

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bekasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan observasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Pengembangan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Kota Layak Anak di Kota Bekasi masih belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan teori Edward III terdapat 4 indikator implementasi yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Birokrasi.

**Komunikasi**, implementasi pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bekasi, pihak DPPPA mensosialisasikan tentang kebijakan Kota Layak Kepada pihak OPD terkait, masyarakat dan dunia usaha. Belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk mengimplementasikan Kota Layak Anak.

Dalam implementasinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan para OPD terkait dalam mengembangkan Kota Layak Anak di Kota Bekasi, seperti dibuat tim Gugus Tugas KLA sebagaimana PERDA No 17 Tahun 2007 tentang pembentukan Gugus Tugas KLA, yang mana untuk koordinasi dengan baik. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang baik agar implementais pengembangan KLA di Kota Bekasi berjalan dengan kondusif.

**Sumberdaya**, Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, secara umum jumlah tersebut sudah cukup mendukung dalam implementasi pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bekasi. Selanjutnya fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi di lapangan oleh peneliti sarana pojok laktasi di Kota Bekasi Sudah sangat memadai dan jumlah nya sudah lumayan banyak seperti di stasiun di mall, seperti yang ada di mall Sumarecon Mall Bekasi terdapat *nurse room* ruang ASI untuk ibu menyusui dan ruang ganti popok anak. Terdapat 10 lokasi di Summarecon Mall Bekasi.

**Disposisi,** Walikota membuat gugus tugas KLA dari beberapa OPD yang terkait agar terlaksananya dan terleasasikan kota layak di kota bekasi masing-masing dari OPD di berikan tanggung jawab dan tugas masing-masing Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah dinas yang menaungi Kota Layak Anak tersebut dan mengkordinir para OPD terkait.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas keputusan Walikota yang menunjuk implementor Gugus Tugas KLA dan yang menjadi anggota Gugus Tugas KLA adalah para OPD terkait dan tidak adanya insentif tambahan kepada gugus tugas kla.

**Birokrasi,** Untuk SOP gugus tugas KLA sendiri sudah di PERDA No 13 Tahun 2017 mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA, melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep KLA, mengumpulkan, menganalisa dan melakukan diseminasi data dasar, melakukan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan dalam menjalankan SOP Gugus Tugas KLA sudah cukup optimal. Masing-masing dari OPD ditugas 2 orang untuk petugas gugus tugas KLA agar memudahkan dalam penyampaian informasi.

Terkait faktor pendukung dan penghambat implementasi pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bekasi pad Klaster kesehatan Dasar. Pentingnya dukungan dari SDM masing-masing OPD, Lembaga Sosial, Dunia Usaha dan Masyarakat. Adanya keterlibatan stakeholder. Faktor dukungang dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mensukseskan implementasi KLA. Kerjasama dalam memenuhi hak anak harus dijalin dengan baik antar ketiganya agar anak dalam hal ini dapat terlindungi, merasa nyaman dan tentunya juga merasa terpenuhi haknya.

Keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi anak. Fasilitas anak merupakan hal penting dalam memenuhi indikator KLA. Adanya fasilitas yang gratis dan mudah diakses bagi anak yang dibangun oleh pemerintah seperti fasilitas kesehatan gratis bagi anak/balita. merupakan bukti bahwa pemerintah sangat serius dalam menjalankan kebijakan KLA ini.

Faktor penghambat terhadap Implementasi pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bekasi pada Klaster Kesehatan dasr dan Pendidikan, kurangnya komitmen

antara pemerintah masyarakat dan dunia usaha serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang adanya implementasi pengembangan Kota Layak Anak di Kota Bekasi pada Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, serta masih banyak ditemukan iklan rokok didekat sekolah-sekolah dan jalan protokol.

## 5.2 Saran

Berdasarkan Penelitian yang berjudul “Implementasi Pengembangan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Kota Layak Anak di Kota Bekasi (studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi)”, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Gugus Tugas KLA Kota Bekasi yang telah dibuat oleh Walikota harus melaksanakan tugas pokoknya yaitu mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA, menyusun RAD KLA, pemantauan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan KLA.
2. Meningkatkan kembali partisipasi masyarakat secara keseluruhan khususnya kepada orang tua dengan melakukan sosialisasi lebih mendalam tentang program Kota Layak Anak pada klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan yang bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
3. Pemerintah perlu membuat data khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu agar setiap anak di Kota Bekasi mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesejahteraan.
4. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, khususnya memenuhi berbagai fasilitas kesehatan bagi anak dan ibu hamil.

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menyumbangkan pemikiran serta masukan bagi Dinas terkait, masyarakat, pembaca, orang-orang yang membutuhkan, serta pada peneliti selanjutnya.